

KAJIAN EKOLOGI KEBUDAYAAN TERHADAP SEKTOR INFORMAL DI PERKOTAAN

Suatu Proses Adaptasi Ketidakseimbangan Interaksi Kota-Desa Akibat Industrialisasi

Oleh
Tri Pranadji

Abstrak

Ditinjau dari segi ekologi kebudayaan, interaksi antara kota dan desa mencerminkan "integrasi" dua sistem masyarakat yang mempunyai tingkat evolusi yang berbeda. Karena perbedaan ini, sangat mungkin terjadi bahwa hubungan antara kota ("industri") dan desa ("pertanian") mengandung indikasi adanya ketidakseimbangan atau kesenjangan dua sistem masyarakat yang seolah-olah secara vertikal tampak terintegrasi dengan baik. Tulisan menentang bahwa munculnya sektor informal di perkotaan diduga sebagai bagian proses adaptasi adanya ketidakseimbangan tersebut. Dengan menelusuri dari adanya aliran energi, bahan, dan informasi secara timbal balik antara ekosistem masyarakat industri di perkotaan dan ekosistem masyarakat pertanian di pedesaan diperoleh beberapa gambaran, **pertama**, industrialisasi yang relatif cepat di perkotaan menjadi salah satu sebab strategis mengapa hubungan antara sistem masyarakat perkotaan dan pedesaan menjadi tidak seimbang. Adanya ketidakseimbangan ini pada gilirannya menempatkan sistem masyarakat pedesaan sebagai subordinasi masyarakat perkotaan. **Kedua**, akibat adanya daya dukung lingkungan (carrying capacity) yang semakin menipis, golongan masyarakat pedesaan yang ingin tetap bisa bertahan dan ingin hidup lebih baik berupaya beradaptasi hidup di lingkungan masyarakat perkotaan melalui wahana sektor informal. **Ketiga**, berkembangnya sektor informal di perkotaan hendaknya tidak dipandang sebagai fakta sosial yang harus diterima begitu saja, melainkan perlu kiranya dipandang juga sebagai adanya gejala kesenjangan dalam pembangunan, misalnya di bidang ekonomi, pendidikan, infrastruktur fisik dan politik. **Keempat**, penataan keorganisasian yang tampak masih luput dari jangkauan tujuan peningkatan partisipasi rakyat dan pemerataan seyogyanya memperoleh sorotan yang lebih wajar. **Kelima**, untuk itulah kiranya bisa diusulkan agar pola pembangunan yang secara operasional selama ini lebih berorientasi pada pertumbuhan ("kota") menjadi lebih ke pemerataan, misalnya melalui strategi "dorong gelombang".

PENDAHULUAN

Oleh ahli ekologi kebudayaan, seperti Steward (1977), kota dan desa dipandang sebagai penggambaran dua sistem sosial yang mempunyai tingkat evolusi budaya yang berbeda, dan keduanya dapat berada dalam bangunan integrasi sosio-budaya secara vertikal. Masyarakat kota umumnya dipandang mempunyai tingkat evolusi budaya lebih tinggi, dan telah melewati tahap sosiobudaya desa. Masyarakat desa mencerminkan tingkat evolusi budaya tertentu yang masih dominan diwarnai budaya pertanian, dari pola berburu-mengumpul hingga pertanian menetap. Dipandang dari sudut ekologi manusia atau kebudayaan, interaksi antara kota ("industri") dan desa ("pertanian") pada gilirannya akan mempengaruhi bagaimana masing-

masing sistem sosialnya berinteraksi dengan lingkungannya.

Industrialisasi yang cepat di negara-negara berkembang pada pasca perang dunia kedua, termasuk di Indonesia, menyebabkan munculnya ketidakseimbangan hubungan antara kota dan desa. Munculnya ketidakseimbangan ini (istilah lain dari kesenjangan dan ketidakmerataan), disebabkan masyarakat desa, yang didukung oleh ekosistem pertanian, berkembang lebih lambat dibanding masyarakat kota, yang didukung oleh ekosistem industri. Perkembangan masyarakat kota yang lebih cepat dimungkinkan karena seakan-akan memperoleh daya dorong ("energi") ganda, yaitu yang bersumber dari hasil pengelolaan ekosistem masyarakat perkotaan itu sendiri dan surplus energi yang diperoleh dalam hubungannya dengan desa.

Sementara itu masyarakat desa hanya mempunyai energi pendorong tunggal, yang berasal dari pengelolaan ekosistem pedesaan. Berkembangnya sektor informal, yang akhir-akhir ini banyak disorot, erat hubungannya dengan ketidakseimbangan tersebut.

Berkembangnya sektor informal dapat dipandang sebagai mekanisme adaptasi sekelompok masyarakat yang berasal di pedesaan untuk tetap bisa bertahan hidup dalam sistem sosiobudaya perkotaan. Dengan nilai, pengetahuan, dan teknologi yang dikuasainya kelompok masyarakat yang berasal dari desa hampir dipastikan tidak akan mampu bersaing dengan masyarakat kota di sektor-sektor formal (misalnya: pegawai bank, guru/dosen, manager pabrik, dan pengelola toko swalayan atau serba ada). Dengan bekal kemampuan yang dimiliki, kelompok masyarakat ini mempunyai cara untuk mengintegrasikan dirinya dalam sistem (budaya) perekonomian perkotaan, yaitu pada kegiatan sektor informal di perkotaan. Dengan demikian dikatakan bahwa perkembangan sektor informal merupakan mekanisme penyeimbangan diri ("homeostasis") dari hubungan antara kota dan desa.

Tulisan ini mengemukakan beberapa hal, yaitu **pertama** tentang konsep dan pendekatan yang dipakai untuk menyoroti perkembangan sektor informal dari sudut pandang ekologi kebudayaan. **Kedua**, membahas gejala dan penyebab ketidakseimbangan hubungan antara kota dan desa. **Ketiga**, menguraikan perkembangan sektor informal sebagai bagian dari proses adaptasi sekelompok masyarakat desa yang mengadu nasib untuk bertahan hidup di kota. **Keempat**, menguraikan tentang alternatif strategi untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut.

KONSEP DAN PENDEKATAN

Hingga dewasa ini, konsep atau definisi tentang sektor informal belum memperoleh kesepakatan baku. Menurut Manning dan Effendi (1985) gagasan sektor informal pertama kali dipopulerkan oleh Hart (1973) melalui tulisannya berjudul "Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana" dalam *Journal of Modern African Studies* (volume 11, 1973). Menurut Hidayat (1987), secara umum pengertiannya mengacu pada tiga hal:

(1) Sektor yang tidak menerima bantuan atau proteksi dari pemerintah. Tjiptoherijanto

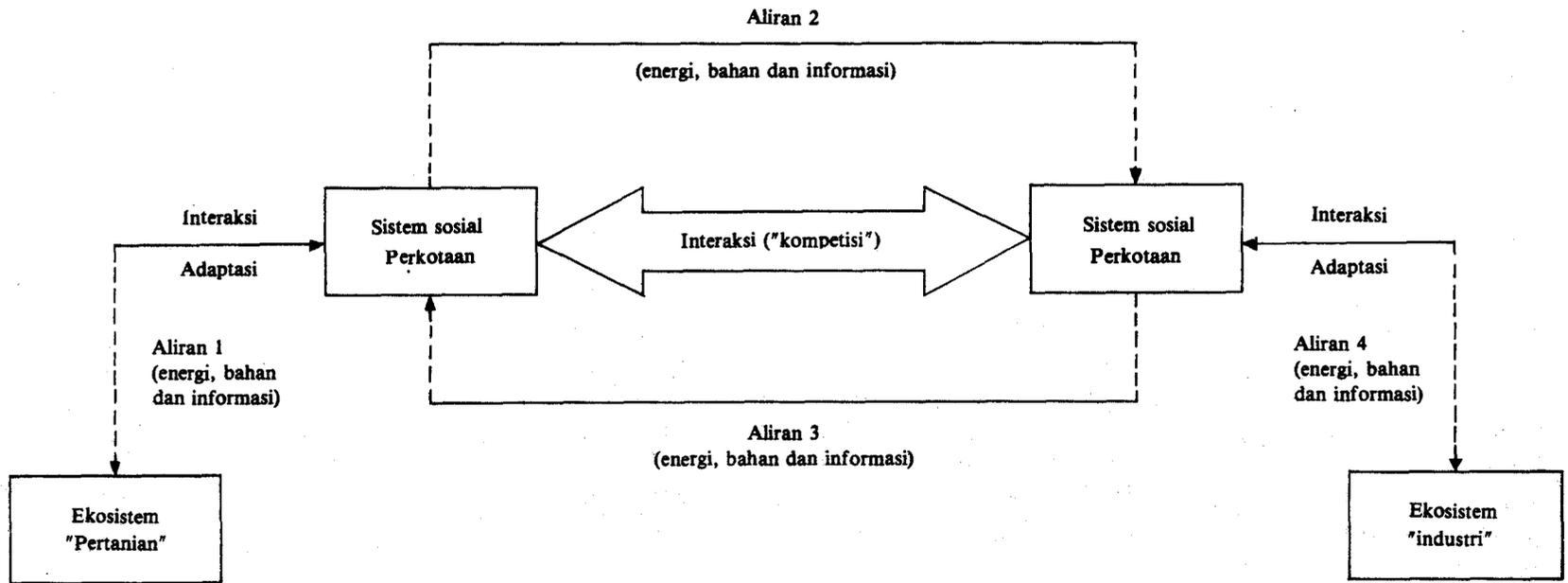
(1989) menambahkan bahwa dalam kegiatan sektor ini terdapat unsur "ilegal".

- (2) Sektor yang belum dapat menggunakan bantuan pemerintah (karena tidak punya access), meskipun pemerintah telah menyediakannya.
- (3) Sektor yang telah menerima bantuan, namun bantuan tersebut belum sanggup membuat sektor ini berdiri sendiri (atau tetap "gurem").

Mengacu dari hal di atas diperoleh kesan bahwa keberadaan sektor informal seakan-akan tidak dikehendaki oleh pemerintah. (Pemerintah berperan sebagai pengendali politik, ekonomi, dan kependudukan di perkotaan dan pedesaan). Pemerintah tampaknya baru mau mengakui keberadaan sektor informal ini setelah sektor ini dalam kenyataan berkembang cukup pesat. Penyebab munculnya sektor informal itu sendiri terkait dengan kurang adanya jaminan untuk hidup layak bagi masyarakat pedesaan yang mengelola ekosistem pertaniannya. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh adanya hubungan yang tidak seimbang antara kota dan desa.

Pendekatan dalam ekologi kebudayaan umumnya menekankan adanya keseimbangan. Dalam kasus ini dicoba dengan pendekatan yang bertitik tolak dari adanya ketidakseimbangan. Menurut istilah umum, ketidakseimbangan ini dapat ditunjukkan oleh adanya gejala alam, misalnya: polusi udara, banjir, naiknya suhu lingkungan, dan degradasi kesuburan lahan pertanian. Sedang dalam bentuk gejala sosial dapat ditinjau dari munculnya (misalnya) kemiskinan, ketimpangan pendapatan, sempitnya lapangan pekerjaan, kejahatan, epidemi, penindasan atau penajahan, dan agresi. Ahli-ahli seperti Rambo (1987), Clapham Jr (1976), dan Vayda (1983) lebih banyak menitik beratkan pada indikator-indikator alam. Sedang ahli-ahli seperti Steward (1977), Bookchin (1982), Forbes (1986), dan Llewellyn dan Howthorn (1945) dalam melihat juga melengkapinya dengan indikator sosial. Munculnya hirarki sosial, konsentrasi penduduk, dan dominasi antar sistem sosial sedikit banyak dipengaruhi oleh adanya krisis ekologi.

Gambar 1 memperlihatkan pendekatan untuk melihat kasus hubungan (interaksi dan kompetisi) antara sistem sosial perkotaan, yang didukung ekosistem industri, dan sistem sosial pedesaan, yang didukung ekosistem pertanian. Dalam kasus ini aliran energi, bahan, dan informasi (Rambo, 1982 dan Clapham, 1976) dapat untuk menjelaskan sebagian dari makna hubungan tersebut. Keterangan-



Gambar 1. Interaksi/"kompetisi" antara sistem sosial perkotaan dan pedesaan.

an lebih lanjut untuk menjelaskan gambar tersebut antara lain adalah:

- (1) Baik pada ekosistem industri (perkotaan) maupun pertanian (pedesaan) masyarakat atau manusia ditempatkan pada hirarki lebih tinggi dari ekosistem.
- (2) Hirarki sistem sosial perkotaan lebih tinggi dari pedesaan. Selanjutnya hubungan timbal-balik, yang didalamnya mengandung makna kompetisi, antara perkotaan dan pedesaan bersifat asimetri atau tidak seimbang. Dominasi kota atas desa diwarnai oleh budaya, politik, sosial, dan ekonomi. Menurut istilah Llewellyn dan Hawthorn (1945), desa merupakan subordinasi kota.
- (3) Akibat konsentrasi penduduk, permodalan, spesialisasi tenaga kerja, infrastruktur ekonomi, kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan politik di perkotaan mengakibatkan aliran energi dan bahan dari desa ke kota lebih deras daripada yang sebaliknya.
- (4) Nilai ekonomi energi, bahan, dan informasi yang dipertukarkan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan tidak seimbang. Hal ini sedikit banyak ikut menentukan bagaimana masyarakat pedesaan berusaha mengeksploitasi sumberdaya alamnya semaksimal mungkin, bahkan seringkali melebihi batas toleransi keseimbangan alam.
- (5) Dari segi budaya masyarakat pedesaan cenderung berevolusi mengarah ke budaya perkotaan atau "great tradition" menurut Redfield (1982). Gambaran ini memperjelas bahwa dari segi budaya masyarakat pedesaan merupakan subordinasi perkotaan.
- (6) Sebagai kelanjutan gambaran di atas, eksploitasi sumberdaya alam di pedesaan tidak saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri (subsistensi dan non subsistensi), namun juga untuk memenuhi permintaan masyarakat perkotaan (misalnya untuk bahan baku industri), mengingat kota relatif miskin sumberdaya alam. Dalam hal ini wilayah pedesaan telah menjadi wilayah alamiah (natural area) masyarakat perkotaan.

GEJALA DAN PENYEBAB KETIDAKSEIMBANGAN

Gejala ketidakseimbangan hubungan antara kota dan desa oleh beberapa ahli (misalnya:

Kasryno dkk, 1989; Rahardjo, 1984; dan Breman, 1986) dicirikan oleh pertumbuhan perekonomian masyarakat perkotaan ("industri") yang lebih cepat dibanding pedesaan ("pertanian"). Relatif lambatnya pertumbuhan perekonomian pedesaan antara lain disebabkan, selain oleh penguasaan informasi (ilmu pengetahuan dan teknologi) yang belum sejalan dengan modernisasi, juga oleh relatif semakin meningkatnya tekanan penduduk terhadap ekosistem pedesaan, terutama tanah. Akibat tekanan penduduk ini daya dukung atau ekosistem pedesaan menurun. Sementara itu, walaupun kota relatif miskin sumberdaya biotik non-manusia dan abiotik (misalnya tanah), masyarakat perkotaan mampu memperkuat dirinya di bidang sarana ekonomi, komunikasi, informasi (termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi), dan alternatif energi (misalnya: listrik, minyak dan gas) sehingga dapat bertahan dan unggul dalam berkompetisi dengan masyarakat pedesaan, khususnya di bidang ekonomi.

Nilai ekonomi energi, bahan dan informasi yang dipertukarkan oleh masyarakat perkotaan dan pedesaan bersifat asimetris, tidak seimbang. Energi yang dialirkan dari pedesaan ke perkotaan umumnya dalam bentuk bahan pangan belum terolah (protein, karbohidrat, dan vitamin) dan bahan bakar tradisional (misalnya: kayu bakar dan arang) umumnya bernilai tukar ekonomi relatif rendah. Menurut Mubyarto (1988), selama 15 tahun terakhir nilai tukar hasil pertanian tanaman pangan terus menurun. Bahan dari hasil pertanian umumnya "voluminous" dan mudah rusak, dan disamping berharga relatif murah juga sangat fluktuatif. Bahan tersebut sebagian digunakan sebagai bahan baku industri. Aliran informasi dari desa ke kota relatif sedikit, kecuali misalnya untuk keperluan studi atau bisnis pertanian bahan mentah.

Energi hasil kebudayaan (industri) masyarakat perkotaan berupa (misalnya) makanan olahan, bahan yang sudah diproses, listrik, minyak, dan gas yang mengalir ke desa merupakan komoditi ekonomi yang mengandung nilai tambah relatif besar. Bahan-bahan yang dihasilkan kota seperti obat-obatan (untuk tanaman, hewan, dan manusia), pupuk dan peralatan/mesin pertanian, peralatan rumah tangga, bahan pakaian dan rumah sebagian besar didatangkan dari kota. Walaupun sebagian dari bahan dan energi tersebut dapat dihasilkan sendiri oleh budaya masyarakat pedesaan, namun biasanya kurang mempunyai daya saing yang cukup untuk menggeser bahan dan

energi yang dihasilkan oleh budaya masyarakat perkotaan.

Dalam pertukaran informasi masyarakat perkotaan lebih mendominasi pedesaan. Adanya radio, televisi, film dan media cetak hal ini memungkinkan masyarakat perkotaan menyalurkan informasi relatif banyak ke pedesaan, yang "jelek" maupun "baik". Disamping media komunikasi searah tersebut melambangkan kemajuan ("modern"), isi informasi lebih banyak menggambarkan kebudayaan (nilai, norma, dan institusi) masyarakat perkotaan. Dengan demikian, hal ini semacam paksaan halus agar budaya masyarakat pedesaan berubah dan mengikuti budaya perkotaan.

Dengan tingkat evolusi kebudayaan yang lebih tinggi, masyarakat perkotaan lebih mempunyai peluang untuk melakukan dominasi atas masyarakat pedesaan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Ini dapat dipandang sebagai sebab penting munculnya hubungan timbal-balik yang tidak seimbang, antara sistem sosial perkotaan dan pedesaan. Perkembangan sektor informal dapat diterangkan dari sebab tersebut, dan terlebih lagi mengingat semakin dirasakan terbatasnya sumberdaya alam pedesaan.

Dikaitkan dengan transformasi dari budaya pertanian ke industri, Rahardjo (1984) menggambarkan bahwa laju peningkatan sumbangan sektor industri di perkotaan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) tidak diikuti oleh peningkatan penyerapan lapangan kerjanya. Sementara itu, menurut Simatupang dkk. (1990) dan Pasandaran dkk. (1990) peningkatan sumbangan sektor pertanian di pedesaan terhadap PDB juga tidak diikuti peningkatan penyerapan lapangan kerjanya. Sejalan dengan pendapat Sajogyo, Rahardjo (1984) menyebutkan bahwa ketidakseimbangan tersebut terkait erat dengan timpangnya struktur penguasaan sumberdaya tanah, yang merupakan sumberdaya strategis perekonomian pedesaan. Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat ikut menambah semakin beratnya tekanan terhadap sumberdaya lahan. (Akibat lebih lanjut, misalnya degradasi kesuburan tanah, erosi dan penggundulan tanah kehutanan, dan kerusakan ekologis lainnya).

SEKTOR INFORMAL SEBAGAI ADAPTASI MENUJU KESEIMBANGAN

Berkembangnya sektor informal di kota dapat dipandang sebagai reaksi dari kelompok masya-

rakat desa yang status kehidupannya terancam untuk mengadakan penyeimbangan diri. Tanpa dituntun atau diarahkan (misalnya) oleh sistem politik pemerintah, masyarakat desa yang menyadari kehidupannya terancam ini berupaya menyesuaikan diri dengan trend perkembangan budaya baru ("kota"). Atau dengan kata lain, dengan bekal budaya lamanya (penguasaan teknologi, tingkat pengetahuan, pengalaman, norma, nilai, dan institusinya), kelompok masyarakat desa ini mencoba mengintegrasikan diri pada pola budaya masyarakat perkotaan.

Proses penyeimbangan diri tersebut menurut Pranadji (1989), dapat ditelusuri dari permasalahan: ketenagakerjaan dan upah, nilai tukar pertanian, langkanya sumberdaya fisik (terutama tanah, terkait dengan *carrying capacity*), konsentrasi infrastruktur budaya (ekonomi, pendidikan, komunikasi, perhubungan, rekreasi dan hiburan serta pelayanan umum lainnya), struktur perekonomian, dan perubahan nilai sosial budaya. Permasalahan-permasalahan tersebut satu sama lain saling mempengaruhi, baik dalam arti mendorong maupun menarik sehingga mempercepat proses adaptasi yang dimaksud. Uraian dari masing-masing masalah tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Ketenagakerjaan dan Upah

Perkembangan industrialisasi di perkotaan, menurut McGee (1971), sering tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai. Akibatnya, adanya urbanisasi besar-besaran (misalnya di Jakarta, Surabaya dan Medan) tidak diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja di sektor formal ("industri") di kota. Upah yang relatif tinggi di sektor formal mensyaratkan juga tenaga kerja berketrampilan dan berpendidikan relatif tinggi. Akibatnya masyarakat urban dari desa ini "terpaksa" harus membuka lapangan kerja sendiri dengan mengandalkan budaya dan semangat hidup yang dimilikinya, (modal dan ketrampilan relatif rendah untuk ukuran kota).

Beberapa studi, antara lain oleh Kasryno dkk (1984) menunjukkan bahwa upah di sektor pertanian ("pedesaan") relatif rendah dibanding di sektor industri ("perkotaan"). Tidak seimbangny upah ini menjadi perangsang bagi penduduk pedesaan, terutama golongan muda yang mulai tidak lagi tertarik di sektor pertanian (Suryana dan Nurmalina, 1988), untuk berurbanisasi. Tidak seimbangny jumlah pencari kerja dan lapangan

kerja di kota memaksa terbentuknya bidang pekerjaan yang kurang terorganisir, yang kemudian disebut sektor informal.

(2) Nilai Tukar Pertanian

Nilai tukar bahan pangan pertanian (contoh: padi, ubi kayu dan kacang tanah) selama 15 tahun terakhir cenderung menurun. Gejala ini menimbulkan ketidakseimbangan pada ekosistem kebudayaan desa, yang pada gilirannya mendorong tenaga-tenaga muda produkif pedesaan "lari" ke kota. Akibat lebih lanjut ekosistem perkotaan mendapat tekanan lebih berat oleh tenaga kerja dari desa. Dengan pembangunan yang memusat (bias urban istilah Sajogyo) di kota, golongan tenaga kerja dari desa tersebut berupaya mengadaptasikan dirinya dalam sistem perekonomian masyarakat kota. Dalam kaitannya dengan ini, bentuk pengadaptasiannya adalah ditandai oleh berkembangnya sektor informal.

(3) *Carryng capacity*: Kelangkaan Sumberdaya Tanah

Tanah merupakan salah satu faktor ekosistem yang penting untuk mendukung kelangsungan hidup makhluk di atasnya (Odum, 1957). Meningkatnya permintaan tanah untuk pemukiman, sarana transportasi, pabrik, gedung perkantoran dan sarana fisik umum lainnya mengakibatkan "penyerobotan-penyerobotan" tanah, yang pada gilirannya mengorbankan tanah-tanah pertanian yang masih produktif. Akibatnya daya dukung tanah, khususnya tanah pertanian di pedesaan, tidak memberi peluang masyarakatnya tetap bisa hidup layak. Dengan demikian, golongan masyarakat pedesaan yang bertanah sempit atau tak bertanah harus menyesuaikan diri dan membuka usaha sektor informal di kota.

(4) Infrastruktur Perkotaan

Perkembangan dan investasi infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, rekreasi dan hiburan, dan pelayanan umum lainnya relatif jauh menonjol di perkotaan. Keadaan ini menjadi perangsang atau penarik efektif bagi mobilitas penduduk, terutama urbanisasi besar-besaran, yang berimplikasi terhadap kurang terkendalinya perkembangan lapangan kerja. Perkembangan infrastruktur perkotaan ini merupakan salah satu pe-

nyebab efektif munculnya ketidakseimbangan interaksi antara kota dan desa. Akibatnya, walaupun mungkin pemerintah tidak menghendaki, masyarakat asal desa ini sulit mencari alternatif melakukan kegiatan ekonomi yang akan mampu menunjang kehidupannya, kecuali dengan berusaha di sektor informal.

(5) Struktur Perekonomian

Kecenderungan di Indonesia, tidak berbeda dengan di negara berkembang lainnya, bahwa struktur perekonomiannya bercorak dualistik. Struktur dualistik ini dicirikan adanya perekonomian modern ("kota") dan tradisional ("desa"). Hal ini diperkuat lagi adanya perbedaan perekonomian padat modal dan padat tenaga kerja, yang berorientasi komersial penuh dan setengah komersial, dan yang berorientasi ke pasaran ekspor dan dalam negeri. Ciri-ciri demikian hampir sejajar dengan perbedaan sektor formal dan informal. Dengan demikian keadaan struktur perekonomian ini juga menjadi penyebab strategis berkembangnya sektor informal di kota.

(6) Perubahan Nilai (Sosial) Budaya

Disamping kota sebagai lokomotif ekonomi, kota juga merupakan pusat kebudayaan dan peradaban. Gambaran ini lebih terasa jika ditujukan pada golongan usia muda di pedesaan yang dewasa ini menunjukkan kecenderungan enggan bekerja di pertanian. Dengan masuknya informasi melalui radio, televisi, film, media cetak, dan sarana komunikasi massal lainnya hal ini mempercepat perubahan nilai budaya masyarakat desa.

Golongan muda di pedesaan umumnya lebih respon terhadap fenomena-fenomena yang melambungkan kemajuan yang bersumber dari kota. Dari pengamatan di beberapa desa (Jawa Barat, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara), kecenderungan golongan muda desa mempertahankan pola kehidupan pedesaan sebagai hal yang mapan ("steady state") mulai terasa banyak berkurang. Golongan muda ini lebih berorientasi untuk mengikuti kemajuan dengan ukuran sosial budaya masyarakat kota. Dengan demikian, proses adaptasi yang dimaksud sebelumnya dapat menyangkut perubahan nilai budaya lama.

Dalam sektor informal jejak-jejak kebudayaan lama masih tercermin. Beberapa ciri budaya lama yang masih tampak, antara lain: norma keakraban, hubungan kekeluargaan, komunikasi personal

(misalnya *gethok tular*), dan struktur organisasinya yang sederhana. Ini menandakan bahwa ada mekanisme penyesuaian budaya pada sektor informal, yaitu dengan tetap mengakomodasi nilai budaya asal ("pedesaan").

PENUTUP DAN IMPLIKASI

- (1) Perbedaan tingkat evolusi budaya antara masyarakat perkotaan dan pedesaan tidak saja berdampak terhadap masing-masing sistem sosial dalam berinteraksi dengan lingkungannya, namun juga mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan di bidang pertukaran informasi, bahan dan energi. Ketidakseimbangan ini pada gilirannya menempatkan desa sebagai subordinasi kota. Dengan demikian pengelolaan dan eksploitasi sumberdaya alam atau fisik di pedesaan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan itu sendiri, namun juga untuk memenuhi permintaan masyarakat industri di perkotaan.
- (2) Hubungan yang tidak seimbang ini tidak saja mengakibatkan sumberdaya alam pedesaan semakin terkuras, namun juga menyebabkan masyarakat pedesaan semakin sulit untuk bertahan hidup dengan dukungan ekosistemnya. Keadaan ini memaksa segolongan masyarakat pedesaan melakukan penyesuaian diri atau adaptasi untuk bertahan hidup di perkotaan. (Masyarakat pedesaan masih sulit beradaptasi di sektor formal, karena tidak mampu bersaing dengan masyarakat perkotaan). Sementara itu, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat semakin menambah kesukaran bagi masyarakat pedesaan untuk tetap dapat bertahan hidup di pedesaan. Daya dukung lingkungannya menjadi relatif berkurang.
- (3) Ketidakseimbangan hubungan antara kota dan desa dapat dipandang sebagai akibat dari proses industrialisasi yang terlalu cepat diperkotaan, namun kurang memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan partisipasi masyarakat banyak di pedesaan. Keadaan ini ditunjukkan oleh tidak seimbang pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja baik di pedesaan maupun di perkotaan. Sementara itu sumberdaya tanah, yang merupakan aset strategis masyarakat pedesaan, penguasaannya tidak mendukung terwujudnya keseimbangan baik ditinjau dari segi mutu, jumlah dan distribusinya.
- (4) Berkembangnya sektor informal tidak semata-mata sebagai fakta sosial yang harus diterima, melainkan juga dapat dipandang sebagai indikator adanya ketidakseimbangan pembangunan yang menyangkut hubungan antara kota dan desa. Ketidakseimbangan tersebut bukan terletak pada perlu atau tidaknya mempercepat transformasi pertanian ke industri, melainkan alokasi dan pemanfaatan sumberdaya pembangunan (investasi, pendidikan, industri, politik, teknologi, dan infrastruktur umum lainnya) untuk mengelola sumberdaya alam dan manusia terlalu bias ke kota. Dengan demikian, walaupun sektor informal tersebut merupakan bagian dari proses adaptasi khas masyarakat terhadap adanya ketidakseimbangan kota-desa, seyogyanya semakin berkembangnya sektor informal di perkotaan perlu dipandang sebagai penyimpangan pembangunan yang cukup serius. Selama kota (industri) tidak siap menampung tenaga kerja yang *drop out* dari desa, sektor informal cenderung menjadi kantong kemiskinan di perkotaan (semacam pemindahan kemiskinan dari desa ke kota).
- (5) Diperkirakan keseimbangan hubungan antara kota dan desa dapat didekati dengan lebih memperhatikan keadaan ekologi dan masyarakat pedesaan. Pendekatan yang mementingkan pertumbuhan dan mengharapkan adanya efek menetas ke bawah ("*trickle down effect*") dalam kenyataan ternyata lebih menempatkan sistem sosial pedesaan berada pada posisi pasif dan tertekan. Dalam istilah Nataatmadja (1989) strategi pertumbuhan ini ibarat menggunakan mekanisme tarik tambang atau *rope pulling*. Dalam strategi ini diharapkan kota akan kuat, yang pada gilirannya akan menarik desa yang berada pada posisi lemah. Pemerataan atau keseimbangan akan lebih efektif dicapai jika menggunakan strategi yang mirip dengan *Marshall Plan*, yang intinya si lemah diperkuat lebih dahulu, yang pada gilirannya akan mendorong kota. Strategi ini dapat dinamakan strategi dorong gelombang atau *wave pushing*.
- (6) Dalam rangka menguatkan sistem sosial dan ekosistem pedesaan dapat ditempuh melalui strategi investasi dan peningkatan daya beli ("*moneter*") masyarakat pedesaan. Di sini terlihat bahwa sistem sosial dan ekosistem pedesaan tidak dilihat sebagai hal yang terpisah. Artinya kuatnya pedesaan tidak hanya di-

tunjukkan oleh baiknya infrastruktur dan sumberdaya alamnya, namun juga mutu kebudayaan dan daya beli masyarakatnya.

- (7) Dikaitkan dengan pencapaian asas pemerataan, selain butir 6, perlu dipertimbangkan adanya penataan keorganisasian sosial yang menjamin berfungsinya pengawasan pembangunan. Ini baru bisa efektif jika distribusi kekuatan ekonomi dan politik mampu menjamin tegaknya kehidupan yang lebih adil dan demokratis. Dari titik ini dapat dijadikan patokan sampai seberapa jauh "pemerintah" dapat menterjemahkan secara operasional demokrasi ekonomi dan politik, yang diamanatkan UUD 1945, dalam implementasi kegiatan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bookchin, M. 1982. *The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy*. Cheshire Books. Palo Alto, California.
- Breman, J. 1986. *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial*. (Pengantar: Sajogyo). LP3ES. Jakarta.
- Clapham Jr, W.B. 1976. *An Approach to Quantifying the Exploitability of Human Ecosystems*. Plenum Publishing Corporation. New York.
- Forbes, D.K. 1986. *Geografi Keterbelakangan: Sebuah Survei Kritis*. (Judul asli: *Geography of Underdevelopment*). LP3ES. Jakarta.
- Hart, J.K. 1973. *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana*. *Journal of Modern African Studies*, Vol. 11, January 1973.
- Hidajat, 1987. *Peranan dan Profil serta Prospek Perdagangan Secara Formal dan Informal dalam Pembangunan*. PRISMA, XVI (7): 3-18. LP3ES. Jakarta.
- Kasryno, F. dan kawan-kawan. 1984. *Konsekwensi Mekanisasi Pertanian di Indonesia*. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.
- Kasryno, F. dan kawan-kawan. 1989. *Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang*. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.
- Llewellyn, E. and A. Howthorn. 1945. *Human Ecology, in Twentieth Century Sociology* (edited by Gurvitch and W.E. Moore). The Philosophical Library. New York.
- Manning, C. dan T.N. Effendi. 1985. *Urbanisasi dan Sektor Informal di Kota*. Penerbit PT. Gramedia. Jakarta.
- Mubyarto. 1988. *Kompas*: 26 Januari 1988. P.T. Gramedia. Jakarta.
- Odum, E.P. 1957. *Fundamental of Ecology*. W.B. Saunders Company. London.
- Nataatmadja, H. 1989. *Asas Tunggal Dalam Dunia Ilmu: Gelombang Ketiga Syarat Mutlak Tinggal Landas pada Pelita VI*. Lembaga Bina Humanika. Bogor.
- Pasandaran, E. dan kawan-kawan. 1990. *Prosiding Patanas: Perkembangan Struktur Ketenagakerjaan dan Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan*. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.
- Pranadji, T. 1989. *Informasi dan Pembinaan Sektor Informal*. Analisis - CSIS, XVIII (6): 581-591. Center for Strategic and International Studies. Jakarta.
- Rahardjo, M.D. 1984. *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rambo, A.T. 1982. *Human Ecology Research on Tropical Agroecosystems in Southeast Asia*. East-West Environment and Policy Institute. Honolulu.
- Redfield, R. 1982. *Masyarakat Petani dan Kebudayaannya*. (Judul asli: *The Little Community, Peasant Society and Culture*). Penerbit Rajawali. Jakarta.
- Simatupang, P. dan kawan-kawan. 1990. *Agro Industri Faktor Penunjang Pembangunan Pertanian di Indonesia*. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.
- Steward, J.H. 1977. *Evolution and Ecology: Essay on Social Transformation*, (Edited by J.C. Steward and R.F. Murphy). University of Illinois Press. Urbana.
- Suryana, A. dan R. Nurmalina. 1988. *Pemuda Pedesaan di Sektor Pertanian*. *Forum Statistik*, II(4): 10-15. Statistika Indonesia dan Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- Tjiptoherijanto, P. 1989. *Sektor Informal Perkotaan dan Masalah Lapangan Kerja*. PRISMA, XVIII (5): 29-35. LP3ES. Jakarta.
- Vayda, A.P. 1983. *Progressive Contextualization: Methods for Research in Human Ecology*, Plenum Publishing Corporation. New York.